

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

- Aartje Tehupeiory. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta : Raih Asa Sukses
- Antje M. Ma'moe. 1996. Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Madya Bandung. Bandung : Universitas Padjajaran
- Adrian Sutedi. 2006. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta Sinar Grafika
- A.P. Parlindungan. 1998. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung : Mandar Maju
- Bambang Sunggono. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Jakarta: Rajawali Pers.
- Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia, (Hukum Tanah Nasional), Jakarta : Djambatan
- Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan
- Boedi Harsono. 2003. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan
- Edy Ruchyat. 2010. Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung : Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum Jakarta: Kencana
- P. Parlindungan. 1993. Komentar Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung : Mandar Maju
- SP Florianus Sangsun. 2007. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta. Visimedia

Haninda Gayuh Sena. 2018 “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

## **B. PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Menteri Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 yang diatur bahwa pendaftaran perubahan data

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Peneriban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mengatur mengenai kriteria tanah terlantar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745)

Keputusan Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan

### C. LAIN-LAIN

<http://repository.unissula.ac.id> diakses pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2021 pada jam 16.23 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/9062-ID-status-kepemilikan-tanah-hasil-konversi-hak-barat-berdasarkan-uu-no-5-tahun-1960.pdf> diakses pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2021 jam 17.11 WIB

Sukardi Lumalente, Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *Lex Privatum*, Vol. V, No. 6 Agustus 2017